



**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Mamuju, Jumat (26/06)** – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran (TA) 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada hari ini (26/06) di Mamuju secara virtual.

Dalam sambutannya, kepala BPK Perwakilan menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada DPRD dan Gubernur/Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan informasi laporan keuangan; (3) efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Polewali Mandar TA 2019, BPK memberikan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah berhasil mempertahankan Opini WTP untuk yang keempat kali secara berturut-turut sejak TA 2016.

Atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar TA 2019 ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai rekomendasi guna meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar TA 2019 antara lain (1) melakukan monitoring anggaran dan realisasi belanja kapitasi sehingga dapat melakukan pengajuan anggaran dana kapitasi dalam APBN dan APBD Perubahan lebih cermat; (2) melakukan validasi dan pendataan ulang Wajib Pajak (WP) dengan melibatkan para Camat dan Kepala Desa; (3) memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Kepala OPD yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian pekerjaan fisik; dan (4) menarik kelebihan pembayaran pada PT TBG dan CV KGr, serta menarik denda keterlambatan pada PT TBG dan CV AMn.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan terkait tidak lanjut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

**Informasi lebih lanjut:**

Kepala Sekretariat, Asih Waryanti  
Telp. (0426) 2322969 ext. 204/206

<https://www.mamuju.bpk.go.id>